



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 5, Issue 2, 2023

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

Implikasi Kenaikan Tarif Angkutan Umum Akibat Perubahan Harga BBM Terhadap Kondisi Sosial Sopir Angkutan Umum

(Implications of the Increase in Public Transport Tariffs Due to the Increase in Fuel Prices on the Social Conditions of Public Transport Drivers)

Melpin Simaremare¹, Fadhilah Kusuma Wardani² dan F. X. Sri Sadewo^{3*}

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Email: melpinsimaremare.21042@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Email: fadhilahkusuma.21052@mhs.unesa.ac.id

³Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Email: fsadewo@unesa.ac.id

ARTICLE INFO

How to Cite:

Simareme, M., Wardani, F. K., & Sri Sadewo, F. (2023). Implikasi Kenaikan Tarif Angkutan Umum Akibat Perubahan Harga BBM Terhadap Kondisi Sosial Sopir Angkutan Umum. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 5(2), 156-169.

Keywords:

Fuel, Income, Public Transport Fares, Online Transportation

Kata Kunci:

BBM, Pendapatan, Tarif Angkot, Transportasi Online

ABSTRACT

The government's decision to increase the price of fuel oil has a direct impact on increasing the operating costs of public transport. This decision was taken due to the increase in world oil prices, which prompted the government to cut fuel subsidies. This situation certainly has an impact on the income of public transport drivers, this is also exacerbated by the existence of online transportation, which is an alternative transportation used by the community, so that it increasingly shifts the existence of public transportation. This study uses a qualitative method that aims to reveal the impact that occurs from the increase in public transport fares due to changes in fuel prices on the condition of public transport drivers. The results showed that the increase in fuel prices had an impact on reduced income and an increase in fuel costs incurred by public transport drivers, decreased people's purchasing power, increased poverty, and unemployment, which had an impact on other social problems such as health and domestic violence. Therefore, the government implemented assistance in the form of BLT (Direct Cash Assistance) and BSU (Wage Subsidy Assistance) which are expected to be effective and right on target to reduce poverty and social inequality due to rising fuel prices.

ABSTRAK

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum. Keputusan ini diambil karena adanya kenaikan harga minyak dunia, sehingga mendorong pemerintah memangkas subsidi BBM. Keadaan ini tentunya berdampak pada penghasilan sopir angkutan

* Corresponding author. Telp.: -
E-mail address: fadhilahkusuma.21052@mhs.unesa.ac.id

umum, hal ini juga diperparah dengan adanya transportasi online yang menjadi alternatif transportasi yang digunakan masyarakat, sehingga semakin menggeser keberadaan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap dampak yang terjadi dari kenaikan tarif angkutan umum akibat perubahan harga BBM terhadap kondisi sopir angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan harga BBM berdampak pada pendapatan yang berkurang dan peningkatan biaya BBM yang dikeluarkan sopir angkutan umum, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak pada masalah sosial lainnya seperti kesehatan dan KDRT. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan bantuan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) yang diharapkan efektif dan tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu bagian dari penunjang perkembangan wilayah, terutama dalam kegiatan perekonomiannya. Transportasi adalah proses memindahkan orang atau barang, kata kerja *to transport* berarti “memindahkan dari satu tempat ke tempat lain”, yang berarti transportasi merupakan proses perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk maksud atau tujuan tertentu. Transportasi merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain (Sihite, 2022). Transportasi memegang peranan penting dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dampak pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi juga meningkat. Angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain di dalam kota. Selain itu, angkutan kota juga merupakan sarana transportasi yang memudahkan pergerakan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat, murah, aman dan efisien (Sihite, 2022).

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara langsung meningkatkan biaya operasional angkutan umum. Keputusan ini diambil karena adanya kenaikan harga minyak dunia, sehingga mendorong pemerintah memangkas subsidi BBM yang berdampak pada seluruh angkutan umum, termasuk angkutan dalam perkotaan. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini, sangat berpengaruh pada semua harga barang atau komoditi yang digunakan masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu saja berdampak pada pengeluaran sopir angkutan umum yang sangat bergantung pada

bahan bakar pertalite dan solar untuk operasional (Siregar, 2005). Menurut portal berita suarasurabaya, sejak kemunculan COVID-19 tahun 2020 dan transportasi online telah menjadi ujian berat bagi para sopir angkot, apalagi masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi online sebagai alternatif transportasi, sehingga angkutan umum semakin tergeser keberadaannya di Surabaya. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya informasi tentang kenaikan harga BBM dan tidak adanya kenaikan tarif yang berarti dari penetapan pemerintah karena bermaksud memberikan pelayanan transportasi yang murah pada masyarakat luas. Tentunya hal ini berdampak pada pendapatan sopir angkutan umum yang semakin berkurang, bahkan sopir angkutan umum juga sering merugi karena jumlah penumpang yang tidak memenuhi target. Biasanya sopir angkutan umum berpenghasilan Rp 50.000 per hari, namun setelah berita kenaikan BBM, penghasilan sopir angkot menjadi Rp 30.000 per hari.

Kenaikan BBM yang berdampak kepada penurunan penghasilan para sopir angkutan umum tentu memberikan dampak juga kepada kondisi perekonomian sopir angkutan umum tersebut. Terjadinya inflasi pendapatan para sopir angkutan umum membuat mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama didalam keluarga. Dari adanya kenaikan BBM ini tentu membuat bahan-bahan pokok lainnya mengalami kenaikan yang membuat masyarakat terutama para sopir angkutan umum mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan menurunnya penghasilan mereka sebagai sopir angkutan umum. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut tentu memberikan masalah sosial juga terhadap kondisi para sopir angkutan umum, contohnya seperti para sopir angkutan umum terlilit hutang akibat didorong untuk memenuhi kebutuhan pokok, terjadinya KDRT pada keluarga dikarenakan para sopir angkutan umum yang dominan kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, mendorong kenaikan masyarakat miskin, dan juga masalah sosial lainnya.

Selain memberikan masalah sosial pada para sopir angkutan umum, adanya kenaikan BBM tentu memicu terjadinya tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh bagian-bagian masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Adanya aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan dan keresahan terhadap kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM sendiri memberikan dampak yang meluas kepada masyarakat terutama para

angkutan umum dan online. Oleh sebab itu, dengan adanya aksi demonstrasi ini diharapkan memberikan perubahan dan keterbukaan pemerintah bahwa dari adanya kenaikan BBM memberikan dampak yang besar kepada kondisi masyarakatnya terutama kepada kondisi perekonomian. Karena terkadang para pemerintahan sendiri didalam membuat atau mengeluarkan suatu aturan tidak didasarkan dengan solusi untuk mengantisipasi masalah yang dibuat dari kenaikan BBM di masyarakat terutama kepada para sopir angkutan umum dan angkutan lainnya yang menggunakan BBM sebagai modal untuk mencari pendapatan.

Pengambilan solusi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tentu harus didasarkan kepada keinginan dan fakta yang terjadi pada lapangan. Karena dengan adanya pengambilan solusi sesuai dengan fakta yang ada pada masyarakat membuat terjadinya integritas di dalam masyarakat dengan pemerintahan. Hal ini juga akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM dengan pemerintahan. Untuk mengetahui keresahan pada masyarakat terutama sopir angkot tentu dibutuhkan survei mendalam di dalam mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tentu dari adanya solusi ini diharapkan memberikan perubahan kepada kondisi masyarakat terutama para sopir angkot yang terkena dampak dari adanya kenaikan BBM.

Berdasarkan fenomena diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana dampak yang terjadi dari kenaikan tarif angkutan umum akibat perubahan harga BBM terhadap kondisi sopir angkutan umum. Kondisi ini cukup mengacaukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama bagi para sopir angkutan umum. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan kenaikan harga BBM kepada kondisi masyarakat terutama sopir angkutan umum dan angkutan lainnya. Solusi tersebut tentu harus didasarkan pada kebutuhan dan fakta yang ada di masyarakat agar terjadi integrasi yang sama antara pemerintahan dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2021). Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data yang diperoleh, kemudian dicari data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau tidak berdasarkan data yang sudah terkumpul. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan yang mengacu pada jenis kondisi sosial yang diciptakan ketika kesadaran dibagi antara anggota kelompok atau masyarakat. Penelitian kualitatif menginterpretasikan fenomena yang terjadi ketika peneliti menjadi sarana utama, pengumpulan data yang menarik, dan teknik pengumpulan *snowball*. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengumpulan data berada di lingkungan alam yang diinginkan, temuan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendorong Terjadinya Kenaikan Harga BBM Pada Tahun 2022

Pada tahun 2022 sendiri Negara Indonesia mengalami kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini sendiri tentunya dikarenakan oleh beberapa faktor yang mendasar. Beberapa faktor tersebut yang membuat kondisi harga BBM di Indonesia tidak stabil dan pada akhirnya mengakibatkan kenaikan pada harga BBM per bulan September 2022. BBM sendiri merupakan salah satu sumber daya alam paling besar dan banyak digunakan baik itu pemerintah dan masyarakat. Dengan hal maka dapat dikatakan bahwa BBM merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dan intensitas dalam penggunaannya sangat besar di Indonesia. Sumber daya minyak yang satu ini tentu tidak hanya banyak dikonsumsi oleh Negara Indonesia, namun negara lainnya terutama negara maju sangat banyak mengkonsumsi bahan hasil minyak bumi tersebut.

Pada bulan September, harga BBM di Indonesia sendiri mengalami kenaikan dan kenaikan harga BBM ini cenderung bisa dikatakan sebagai kenaikan yang sangat drastis. Kenaikan salah satu hasil minyak bumi ini tentunya memberikan pengaruh terhadap

masyarakat, dimana masyarakat akan merasa semakin sulit untuk mendapatkan BBM karena faktor harga BBM yang relatif tidak ekonomis kepada masyarakat (Purnomo et al., 2020). Terutama pada golongan masyarakat kelas kebawah. Tidak hanya memberikan pengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat, BBM juga memberikan pengaruh kepada naiknya harga barang-barang pokok lainnya (Darma et al., 2018). Dengan naiknya harga barang-barang pokok pada masyarakat akibat dari kenaikan BBM ini tentunya akan membuat kondisi sosial pada masyarakat semakin terjerumus. Kondisi ini dikarenakan masyarakat terlebihnya masyarakat kelas bawah akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau membeli suatu barang-barang pokok tersebut karena harganya yang meningkat. Tentunya meningkatnya harga barang-barang pokok tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada pada masyarakat.

Kenaikan harga BBM pada Negara Indonesia tentunya didasarkan kepada beberapa alasan yang membuat pemerintahan Indonesia mengambil langkah untuk menaikkan harga dari BBM tersebut. Salah satu pendorong yang membuat pemerintah menaikkan harga minyak BBM sendiri dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah bumi yang dimana tembus hampir sekitar lebih dari 100 USD/barel yang dimulai sejak bulan Maret 2022 dan sampai per bulan September 2022 masih bertahan harga dari minyak mentah tersebut (Purnomo et al., 2020). Kenaikan minyak mentah di dunia diakibatkan oleh faktor terjadinya perang yang menimpa negara Rusia dengan Ukraina. Seperti yang diketahui adanya perang antara Rusia-Ukraina ini memberikan banyak sekali pengaruh kepada kondisi negara terlebihnya kepada negara-negara lainnya. Adanya kenaikan harga minyak mentah ini tentunya membuat pemerintah Indonesia harus memutar pikiran untuk mencari strategi agar Indonesia sendiri tidak mengalami krisis ekonomi atau inflasi yang diakibatkan oleh banyaknya pengeluaran APBN yang dianggarkan kepada sumber daya alam minyak mentah tersebut. Karena jika hal ini tidak ditangani maka akan memberikan potensi terhadap kondisi belanja subsidi yang semakin membengkak.

Menurut Direktur *Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR)*, Febby Tumiwa. Menjelaskan bahwa jika kondisi kenaikan harga minyak mentah yang semakin melonjak tentunya akan memberikan dampak terhadap biaya operasional Pertamina dimana sebagai pihak yang melakukan impor komoditas sumber daya tersebut akan membengkak jika dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Febby juga menjelaskan

selain pengaruh dari kenaikan harga minyak mentah pengaruh dari nilai dollar AS terhadap rupiah akan memperparah kenaikan harga minyak mentah. Hal ini dikarenakan apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menurun tentunya akan membuat kondisi kenaikan dari harga minyak mentah tersebut semakin tidak terkontrol. Dengan adanya kenaikan modal yang dikeluarkan oleh PT Pertamina ini tentunya akan membuat harga jual dari BBM terhadap masyarakat Indonesia akan meningkat. Selain itu, biaya transportasi untuk logistik dan ongkos operasional kilang juga memberikan beban kepada banyaknya pengeluaran pemerintah terutamanya pertamina.

Kenaikan BBM sendiri di Indonesia pada awalnya dimulai dengan adanya kenaikan Pertamina. Dengan adanya kenaikan Pertamina diharapkan dapat menjaga agar tidak inflasi dan mempertahankan daya beli pada masyarakat. Komisaris Utama PT Pertamina sendiri, Basuki Tjahaja Purnama. Menjelaskan bahwa adanya kenaikan harga Pertamina sendiri tidak membuat pertamina berharap untuk mendapatkan keuntungan dari adanya kenaikan harga BBM tersebut. Kenaikan Pertamina ini diakibatkan karena adanya penyesuaian dengan kondisi kenaikan minyak mentah pada dunia. Setelah pemerintah menaikkan harga dari Pertamina, selanjutnya pemerintah juga mengambil peranan untuk menaikkan harga dari BBM pertalite per bulan Oktober 2022. Kenaikan Pertalite ini sendiri cenderung membuat respon dari masyarakat semakin negatif kepada para petinggi-petinggi negara. Karena masyarakat beranggapan bahwa para pemerintah hanya memikirkan kepentingan golongannya saja tidak memikirkan bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut kepada masyarakat. Terutamanya kepada masyarakat golongan kelas menengah kebawah.

Namun lanjutnya kenaikan BBM terutama Pertalite pemerintah tentunya memiliki alasan. Menurut dari analisis Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi subsidi terutamanya kepada subsidi energi akan membengkak yang awalnya dari Rp. 198 triliun menjadi Rp. 700 triliun apabila harga dari Pertalite tidak naik. Data pertamina sendiri juga sudah mencatat bahwa penyaluran dana yang dianggarkan untuk pertalite sendiri sudah mencapai angka 16,8 juta kl pada akhir Juli 2022. Apabila dana anggaran APBN sendiri hanya difokuskan untuk pembelian minyak mentah tentunya akan memberikan dampak yang buruk kepada kondisi keuangan negara Indonesia. Selain memberikan dampak yang buruk kepada

kondisi keuangan Indonesia, terfokusnya anggaran yang dikeluarkan hanya untuk minyak mentah akan membuat aspek-aspek penting negara untuk menunjang tatanan negara tentunya tidak dapat bergerak dan berkembang akibat tidak adanya atau kurangnya saluran dana yang diberikan kepada aspek tersebut.

Pemerintahan Indonesia sendiri di dalam menjaga stabilitas harga dari BBM tentunya memerlukan suatu strategi dan formula agar menjaga kestabilan dari harga BBM tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah sendiri harus bisa melanjutkan suatu kebijakan transformasi dari yang sebelumnya subsidi secara komoditi diganti menjadi subsidi dengan didasarkan kepada penerima. adanya transformasi yang dilakukan pemerintahan sendiri tentunya memiliki tujuan untuk menjaga skema perlindungan sosial secara merata. Dengan adanya penargetan subsidi sendiri diharapkan akan membuat subsidi lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada pada masyarakat. Tentunya Di dalam menjalankan program pengelolaan subsidi energi akan mendapatkan suatu tantangan. Tantangan-tantangan yang dialami oleh pemerintah ini bisa dilihat dari (1) ketidaktepatan sasaran penerima subsidi dimana tentunya membuat adanya ketimpangan pada masyarakat, (2) kurang optimalnya pengawasan terhadap bagaimana pengimplementasian kebijakan subsidi. (3) adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah, dan (4) adanya potensi fiskal yang muncul akibat dari tidak adanya penerapan kebijakan penyesuaian nilai rupiah.

Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Kondisi Para Sopir Angkutan Umum

Kenaikan BBM yang terjadi di Indonesia pada 2022 tentunya berpengaruh terhadap kondisi para sopir angkutan umum. Berdasarkan (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya, pemerintah menetapkan tarif yang dibebankan pada penumpang sebesar Rp. 4.000, - per 15 kilometer, dan tambahan sebesar Rp. 200, - untuk tambahan per satu kilometer selanjutnya, untuk penumpang yang berstatus pelajar yang berseragam sekolah dibebankan 50% dari tarif yang berlaku. Akan tetapi setelah terjadinya kenaikan harga BBM, tarif tersebut sangat merugikan para sopir angkutan

umum. Kenaikan harga BBM yang terjadi tentunya berdampak pada kondisi sopir angkot salah satunya Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Kenaikan harga BBM tidak hanya berpengaruh pada peningkatan biaya BBM yang dikeluarkan oleh sopir angkutan umum, tetapi juga mempengaruhi harga suku cadang khususnya oli kendaraan dimana komponen tersebut merupakan bagian dari Biaya Operasional Kendaraan. Perhitungan tarif angkutan umum merupakan hasil dari perkalian antara tarif pokok dengan rata-rata jarak perjalanan (tarif *Break Event Point*) dan tambahan 10% untuk keuntungan perusahaan. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih kecil dari tarif yang seharusnya berlaku ditengah kenaikan harga BBM tersebut dan tarif yang berlaku di lapangan tidak dapat menutupi BOK. Pada kenyataannya perhitungan BOK lebih besar dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya sangat merugikan para sopir angkutan umum yang sebagian berasal dari perekonomian menengah bawah, pendapatan yang mereka dapatkan semakin kecil karena harus menutupi Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Oleh karena itu, Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Surabaya mengajukan usul kepada Dinas Perhubungan untuk menaikkan tarif angkutan umum khususnya angkot yang semula Rp. 5.000.- menjadi Rp. 6.000.- kenaikan tarif angkutan umum tersebut diharapkan mampu menutupi kekurangan Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

Selain menurunnya pendapatan sopir angkutan umum akibat kenaikan harga BBM, keadaan ini juga diperparah dengan adanya ojek *online*. Sejak awal kemunculannya telah memicu banyak konflik, terutama antara transportasi *online* dan transportasi konvensional. Keadaan ini dipicu oleh kecemburuan sosial, dimana sopir angkutan umum merasa terganggu dengan kemunculan ojek *online* yang dianggap sebagai alasan penghasilan dari sopir angkutan umum berkurang. Ketika ojek *online* mulai dikenal masyarakat, sedikit demi sedikit masyarakat mulai meninggalkan angkutan umum karena dianggap kurang efisien dan menganggap ojek *online* lebih memudahkan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berangkat sekolah, bekerja, kuliah dan sebagainya. Hal ini tentu saja semakin mempersulit sopir angkutan umum untuk memenuhi target pendapatan mereka karena harus bersaing lebih ketat lagi selain dengan sesama sopir angkutan umum tetapi juga dengan ojek *online*.

Kenaikan harga BBM yang cenderung drastis juga berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan BBM tentu akan melemahkan kondisi sosial masyarakat, apalagi di tengah kondisi pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Hal ini tentunya mengakibatkan penurunan daya beli jangka pendek karena penurunan pendapatan (*income effect*) dari sopir angkutan umum. Para sopir angkutan umum akan lebih mudah terlilit hutang akibat didorong untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama kelompok rumah tangga menengah ke bawah atau miskin yang tidak memiliki cukup ruang untuk menghadapi masalah likuiditas jangka pendek. Kondisi ini kemudian menyebabkan masyarakat menengah bawah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga dan penurunan pendapatan. Kenaikan harga sembako tentunya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Jika keadaan ini terus berlanjut akan memicu masalah-masalah baru misalnya kesehatan dan KDRT. Kesehatan mempengaruhi tingkat keberfungsian seseorang secara fisiologis, psikologis dan sosial budaya. Bersamaan dengan pendidikan, kesehatan merupakan investasi dalam membangun perekonomian dan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan naiknya harga barang pokok, keluarga dengan perekonomian menengah bawah harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara memangkas kebutuhan tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada kurangnya gizi anak yang akan menyebabkan menurunnya tingkat intelegualitasnya. Kondisi kepala keluarga yang terlilit hutang sangat mudah memicu terjadinya KDRT pada keluarga menengah ke bawah karena posisi mereka yang dominan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Selain itu kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Arin menjelaskan, data BPS Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan meningkat 3,975 persen atau sekitar Rp 505.469 dibandingkan September 2021. Keadaan akibat kenaikan harga BBM tersebut mendorong masyarakat untuk mengajukan kebijakan kompensasi seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) untuk mengimbangi dan bentuk kompensasi akibat kenaikan harga BBM. Situasi ini juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Karena bahan bakar merupakan bahan dasar untuk operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM membebani biaya produksi. Akhirnya,

perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi produk. Oleh karena itu, perusahaan harus memutuskan untuk tidak merekrut karyawan baru dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga keadaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran. Bukan tidak mungkin, ketika angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akan menimbulkan kekacauan dan demonstrasi. Pada 2013, ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan Istana Negara, Pertamina, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menentang kenaikan harga BBM. Hal tersebut seharusnya menjadi pembelajaran. Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, ada baiknya memperhatikan beberapa hal seperti inflasi dan daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 50% dari PDB, sehingga jika inflasi meningkat, maka dengan sendirinya akan membatasi konsumsi masyarakat dan juga menurunkan PDB.

Fakta sosial yang ada pada masyarakat karena dampak dari kenaikan BBM tersebut tentu memberikan banyak sekali perubahan kepada kondisi masyarakat. Namun perubahan yang dirasakan oleh masyarakat terlebihnya para kelompok sopir angkot cenderung membawa kepada perubahan yang membuat kondisi status sosial mereka pada masyarakat semakin menurun drastis. Perubahan yang membawa kepada permasalahan jatuh miskin, kebutuhan pokok, KDRT, pengangguran, dan juga permasalahan kesehatan yang dirasakan oleh para golongan masyarakat bawah seperti sopir angkot tentunya akan memberikan pekerjaan juga terhadap pemerintahan untuk mengurus dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi akibat dari dampak kenaikan BBM ini pada masyarakat. Sebab apabila permasalahan sosial yang pada kelompok masyarakat seperti kelompok sopir angkot tidak dapat diatas tentunya akan membuat disintegrasi dan *chaos* yang ada pada masyarakat. Karena setiap kelompok masyarakat tentunya tidak ingin terus berada pada jurang kematian. Mereka tentu berusaha untuk ingin melakukan perubahan baik itu dengan cara yang benar atau secara tidak benar (kriminalitas, pencurian, dan lainnya). Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif BBM sendiri mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan kepada kelompok kelas atas. Namun kepada para kelompok masyarakat kelas bawah sangat terasa pengaruhnya. Tentunya hal ini memicu terjadinya permasalahan kepada kondisi kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat terutamanya kelompok sopir angkot.

4. KESIMPULAN

Keputusan pemerintah menaikkan harga minyak pemanas (BBM) secara langsung meningkatkan biaya operasional angkutan umum dan berdampak pada penurunan pendapatan sekaligus kondisi perekonomian sopir angkutan umum. Kenaikan harga BBM di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga minyak di atas 100 USD /barel dan perang antara Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi keadaan negara Indonesia, dan keadaan negara lain. Kenaikan harga BBM di Indonesia pada tahun 2022 tentunya akan mempengaruhi kondisi sosial para sopir angkutan umum, seperti pendapatan berkurang, peningkatan biaya BBM yang dikeluarkan sopir angkutan umum, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang nantinya akan berdampak pada masalah sosial lainnya seperti kesehatan dan KDRT. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan penargetan bantuan yang diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Selain itu pemerintah jika ingin menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan seharusnya dikaji lebih dahulu dampak secara universal kepada seluruh masyarakat agar tidak memicu adanya kesenjangan yang berakhir kepada munculnya permasalahan sosial seperti permasalahan kependudukan dan kesehatan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya analisis yang lebih dalam sangat dibutuhkan agar terciptanya kesetaraan dan integrasi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, D. C., Pusriadi, T., Permadi, Y., Sekolah, H., Ilmu, T., & Samarinda, E. (2018). DAMPAK KENAIKAN HARGA KOMODITAS SEMBAKO TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA. *Seminar Nasional Dan Call for Paper*.
- Maryono, M., Hamzah, H., & Amiluddin, A. (2020). DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL BBM JENIS SOLAR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI NELAYAN TANGKAP GALESONG UTARA. *JURNAL MINA SAINS*, 6(2).
<https://doi.org/10.30997/jmss.v6i2.3142>
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. REMAJA ROSDAKARYA.

- Ningsih, Y. I., & Muthmainnah, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, dan Harga Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Industri Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.52>
- Novalina, A. (2018a). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP KETAHANAN DISPOSABLE INCOME NELAYAN DESA BAGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–12.
- Novalina, A. (2018b). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP KETAHANAN DISPOSABLE INCOME NELAYAN DESA BAGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–12.
- PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA, (2014).
- Purnomo, S. D., Istiqomah, I., & Badriah, L. S. (2020). PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal PROFIT Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.36706/jp.v7i1.11025>
- Setiyowati, A. (2019). Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat (Tinjauan Kritis Konsepsi Keadilan Sosial Ekonomi Ibnu Taimiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).107-119](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).107-119)
- Sihite, A. J. (2022). Evaluasi tarif angkutan umum minibus L_300 dan minibus jumbo trayek Langsa-Medan berdasarkan biaya operasional kendaraan (BOK). *Journal of Planning and Research in Civil Engineering*, 1(1), 16–24.
- Siregar, B. W. (2005). IMPLIKASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PENDAPATAN SUPIR ANGKUTAN KOTA DI PALEMBANG .

Doctoral Dissertation, Sriwijaya University.

suarasurabaya. (2022). *Angkot di Surabaya Makin Sepi Penumpang Imbas Kenaikan Harga BBM*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/angkot-di-surabaya-makin-sepi-penumpang-imb-kenaikan-harga-bbm/>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.

Wardani, W., Suriana, S., Arfah, S. U., Zulaili, Z., & Lubis, P. S. (2022). Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia. *AFoS J-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 3, 63–70.